



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-~~718~~ TAHUN 2025  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
PERIODE 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur Periode 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1570);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 137);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur No 140);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur periode 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan bupati ini.
- KEDUA : Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur periode 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur periode 2025-2029, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 9 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
KAMARUDIN MUTEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE 2024-2029

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur  
Unsur Pengawasan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

| No | Tujuan                                                              | Indikator Tujuan                                       | Sasaran Strategis                                                                             | Indikator Sasaran                                                                                                       | Program                                                     | Indikator Program                                                                                                                    | Bidang Urusan | Unit PD Penanggungjawab | Sumber Data                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan pemerintahan | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Hasil Evaluasi SAKIP Minimal Kategori "BB"                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          | Persentase Penyelesaian Tindaklanjuti Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK                                                       | PENGAWASAN    | INSPEKTORAT DAERAH      | - RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029                                                                                                     |
|    |                                                                     |                                                        |                                                                                               | Manajemen Risiko Indeks (MRI)                                                                                           |                                                             | Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti (Irbn Kesra, Irbn Pemerintahan, Irbn Ekbang dan Irbn Investigasi) | PENGAWASAN    | INSPEKTORAT DAERAH      |                                                                                                                                                      |
|    |                                                                     |                                                        | Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                         | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                                                                  |                                                             | Persentase Keterjadian Kasus Hukum pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa                                                         | PENGAWASAN    | INSPEKTORAT DAERAH      | - Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029                                                                                |
|    |                                                                     |                                                        |                                                                                               | Perangkat Daerah ZI yang diusulkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)                                              | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI     | Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Tindak Lanjut Hasil Konsultansi                                                           | PENGAWASAN    | INSPEKTORAT DAERAH      |                                                                                                                                                      |
|    |                                                                     |                                                        |                                                                                               | Peringkat Capaian Target Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK RI (MCSP KPK) Tingkat Provinsi |                                                             | Peringkat Capaian Atas Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK RI (MCSP KPK) pada Area Pengawasan Tingkat Provinsi        | PENGAWASAN    | INSPEKTORAT DAERAH      |                                                                                                                                                      |
|    |                                                                     |                                                        |                                                                                               | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara                                                                            |                                                             | Persentase Perangkat Daerah ZI yang ditingkatkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)                                             | PENGAWASAN    | INSPEKTORAT DAERAH      |                                                                                                                                                      |
|    |                                                                     |                                                        | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                                           | Nilai SAKIP Inspektorat Daerah                                                                                          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                                     | PENGAWASAN    | INSPEKTORAT DAERAH      | - Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur |
|    |                                                                     |                                                        |                                                                                               |                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                      |               |                         |                                                                                                                                                      |
|    |                                                                     |                                                        |                                                                                               |                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                      |               |                         |                                                                                                                                                      |
|    |                                                                     |                                                        |                                                                                               |                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                      |               |                         |                                                                                                                                                      |

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
  
KAMARUDIN MUTEN

FORMULA PENGHITUNGAN IKU PERANGKAT DAERAH

| NO | INDIKATOR                                                                                                               | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUMUS                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TUJUAN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| 1  | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                                                                  | Maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi yang satuan ukurnya adalah level maturitas. Dasar hukum penilaian penyelenggaraan maturitas SPIP adalah Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016.                                                                                                                                                                                                                      | Mengambil data dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penilaian SPIP Terintegrasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)                                                                      |
|    | SASARAN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| 1  | Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Hasil Evaluasi SAKIP Minimal Kategori "BB"                                  | SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah                                                                                                                                                                                   | $\frac{\text{(Jumlah Perangkat Daerah (PD) dengan Kategori BB)}}{\text{(Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah (PD))}} \times 100\%$                                                                       |
| 2  | Manajemen Risiko Indeks (MRI)                                                                                           | Ukuran Kuantitatif yang menggambarkan tingkat kematangan atau kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam sebuah organisasi melalui perhitungan parameter-parameter tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mengambil data dari Laporan Hasil Evaluasi ( LHE ) Mandiri Penilaian Manajemen Risiko                                                                                                                   |
| 3  | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                                                                  | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.                                                                                                                                                                                                                                       | Mengambil data dari Laporan Hasil Evaluasi ( LHE ) Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)                               |
| 4  | Perangkat Daerah ZI yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK )                                           | Unit Kerja yang diusulkan untuk memperoleh Predikat WBK harus memenuhi beberapa syarat baik pada Level Instansi Pemerintah secara umum maupun pada Level Unit Kerja yang Spesifik. Perangkat Daerah yang meraih Predikat WBK diharapkan menjadi percontohan dan Akselerator bagi untuk kerja lain untuk terus menerapkan Reformasi Birokrasi. Tujuan Zona Integritas adalah bagian dari Program Reformasi Birokrasi diindonesia yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih,Akuntabel dan memberikan Pelayanan Publik yang Prima | $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) ZI yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) ZI yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)}}$ |
| 5  | Peringkat Capaian Target Rencana Aksi Program pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK RI (MCSP KPK) Tingkat Provinsi | Peringkat Capaian Target Rencana Aksi <i>Monitoring Center For Prevention</i> (MCP) KPK Tingkat Provinsi Sebagai Instrumen Strategis untuk Mengukur Efektivitas Upaya Pencegahan Korupsi dan Mendorong Perbaikan Tatakelola Pemerintahan didaerah. Peringkat MCP adalah suatu cara KPK memastikan adanya upaya nyata dan Terukur dari Pemerintah Daerah untuk Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Integritas.                                                                                                                      | Mengambil data dari Hasil Penilaian Capaian Target Rencana Aksi Program pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK RI (MCSP KPK) Tingkat Provinsi                                                       |
| 6  | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah                                                           | Ukuran Statistik yang Menggambarkan Kualitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\frac{\text{(Skor Kualifikasi + Skor Kompetensi + Skor Kinerja + Skor Disiplin)}}{4}$                                                                                                                  |
| 7  | Nilai SAKIP Inspektorat Daerah                                                                                          | Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Mencakup Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi Internal, dan Capaian K\inerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mengambil data dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur                                                                      |

BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN